

Peran Dinas Pariwisata dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kampung Adat Gurusina di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Vinsentius Philipus Balu Sawu¹⁾, Ika Devy Pramudiana²⁾, Sri Roekminiati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: vinsentiusp@gmail.com

ABSTRAK

Kampung adat Gurusina merupakan aset budaya yang harus dijaga oleh masyarakat kampung adat, dibantu dengan pemerintah dalam pemeliharaan aset budaya agar tidak punah atau hilang karena perkembangan zaman. Peran pemerintah dan masyarakat untuk tetap melestarikan budaya dan kemajuan sektor kepariwisataan adalah suatu keharusan, karena adat istiadat dan budaya merupakan jati diri dari masyarakat sebagai penganut budaya tersebut yang memiliki nilai pariwisata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata budaya kampung adat Gurusina, untuk mengetahui peran yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata budaya kampung adat Gurusina, untuk mengetahui hambatan dan dukungan dalam pengembangan destinasi wisata budaya kampung adat Gurusina. Adapun teori yang digunakan adalah teori menurut oleh Arif (2012) terkait peran pemerintah daerah yang meliputi peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sedangkan untuk peran masyarakat digunakan teori menurut Dian Herdiana (2019) peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata meliputi sebagai pemrakarsa, pelaksana, penyerta, peninjau, dan penerima manfaat. Berdasarkan analisis penelitian dapat diketahui peran yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada sudah cukup optimal baik dari peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator terhadap pengembangan destinasi wisata budaya kampung adat Gurusina. Hanya saja ada beberapa hal terkait promosi dan pembangunan secara fisik seperti toilet umum belum maksimal. Lebih lanjut, peran masyarakatnya sudah cukup optimal dalam menjalankan perannya sebagai pemrakarsa, pelaksana, penyerta, peninjau, penerima manfaat. Sehingga, faktor penghambat dalam pengelolaannya yang belum solid serta masyarakat masih ada yang belum begitu aktif dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata kampung adat Gurusina. faktor pendukungnya adalah daya tarik itu sendiri serta adanya bentuk keterlibatan dari instansi pemerintah lain dibantu dengan yayasan kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata, Pengembangan Destinasi, Masyarakat Gurusina

Abstract

The Gurusina traditional village is a cultural asset that must be safeguarded by the traditional village community, assisted by the government in maintaining cultural assets so that they do not become extinct or disappear due to developments over time. The role of the government and society to continue to preserve culture and progress in the tourism sector is a must, because customs and culture are the identity of the community as adherents of that culture which has tourism value for the progress and welfare of the community and the region. For this reason, this research aims to determine the role played by the Tourism Department in developing the cultural tourism destination of the Gurusina traditional village, to find out the role played by the community in developing the cultural tourism destination of the Gurusina traditional village, to find out the obstacles and support in developing the cultural tourism destination of the Gurusina traditional village. The theory used is the theory according to Arif (2012) regarding the role of regional government which includes the role of regulator, dynamist, facilitator and catalyst. Meanwhile, for the role of the community, theory is used according to Dian Herdiana (2019), the role of the community in tourism development includes being the initiator, implementer, participant, observer and beneficiary. Based on the research analysis, it can be seen that the role given by the Ngada Regency Tourism Office is quite optimal, both in terms of its role as regulator, dynamist, facilitator and catalyst for the development of the cultural tourism destination of the Gurusina traditional village. It's just that there are several things related to promotion and physical

development, such as public toilets that are not optimal. Furthermore, the role of the community is quite optimal in carrying out their roles as initiators, implementers, participants, observers and beneficiaries. Thus, the inhibiting factors in its management are not yet solid and there are still people who are not very active in developing and managing tourism in the Gurusina traditional village. The supporting factors are the attraction itself and the involvement of other government agencies assisted by other community foundations in both physical development and community empowerment.

Keywords: *Tourism, Destination Development, Gurusina Community*

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang sangat erat kaitannya dengan berbagai fasilitas atau jasa lainnya yang disediakan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pariwisata berkontribusi besar dalam proses pembangunan dinegara-negara berkembang, yakni dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan infrastruktur serta perekonomian daerah (Begum Alam & Siwar, 2014).

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengembangan pariwisata yaitu usaha untuk meningkatkan atau melengkapi fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan agar merasa nyaman saat berada di tempat wisata. Pengembangan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, maju, sempurna, dan berguna (Alwi Hasan dkk, 2005:269).

Pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Peran yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata yaitu penyediaan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan stakeholder lain dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Selain itu, pemerintah yang merupakan pihak fasilitator memiliki peran dan fungsi dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan destinasi wisata.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali destinasi

wisata, baik itu alam maupun budaya. Dari banyaknya potensi wisata yang dimiliki Indonesia, masih banyak potensi-potensi wisata tersebut yang belum dikelola secara baik.

Salah satu propinsi yang memiliki beragam potensi destinasi wisata adalah Nusa Tenggara Timur. Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali destinasi wisata alam dan budaya. Wisata alam yang paling terkenal adalah Taman Nasional Komodo yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Selain Labuan Bajo, masih banyak tempat yang memiliki destinasi wisata baik alam maupun budaya.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada memiliki potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga menjadikan Kabupaten Ngada sebagai daerah wisata. Kabupaten Ngada memiliki sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan mulai dari wisata alam seperti (wisata 17 Pualu Riung, Pemandian Air Panas Nage, Pemandian Air Panas Mengeruda, wisata Wolobobo, Air terjun Ogi, Bukit Watu Nari Wowo), wisata budaya seperti (Kampung Adat Bena, Kampung Adat Maghilewa, Kampung Adat Tololela, Kampung Adat Gurusina, Kampung Adat Boloji, Kampung Adat Bela), dan wisata rohani seperti Taman Wisata Rohani Wolowio.

Beragamnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Ngada, sudah sepantasnya daerah ini menjadi daerah wisata yang unggul. Seluruh objek wisata yang ada masih dalam kendali pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. Pengembangan dan

pengelolaan masih mengandalkan insentif pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta serta masyarakat.

Kampung Gurusina secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gurusina terletak 16 km dari Aimere dan 21 km dari Bajawa, kampung ini lebih tepatnya terletak di lereng Gunung Inerie. Salah satu ciri khas kampung ini adalah lokasinya yang berlatar Gunung Inerie dengan rumah-rumah adat yang struktur bangunannya terbuat dari kayu-kayu khusus serta bambu dan alang-alang sebagai atabnya. Rumah adat ini sangat bernilai tinggi memiliki status atau kedudukan serta peranannya masing-masing di dalam suatu *woe*(klan). Di dalam rumah berisi benda-benda pusaka adat-istiadat yang digunakan sesuai dengan ritual adat yang dibuat. Uniknya objek wisata yang ada menjadi daya tarik wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada dan Kampung Adat Gurusina dipilih sebagai tempat penelitian karena begitu banyak tempat wisata yang ada di kabupaten Ngada, sehingga bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada dalam mengolah dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Untuk sementara pemerintah telah melakukan pengembangan kampung adat Gurusina dengan membangun serta mendanai pembangunan terhadap rumah-rumah adat *sao* pasca kebakaran yang menghancurkan sebanyak 27 rumah adat *sao* dari 33 rumah yang ada dan 3 pasang *ngadhu dan bhaga* tahun 2018 lalu, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan perbaikan jalan menuju kampung adat Gurusina. Kampung adat Gurusina dipilih sebagai tempat penelitian karena kampung Gurusina adalah salah satu kampung tujuan wisata di Kabupaten Ngada yang memiliki potensi untuk harus dikembangkan pariwisatanya.

Dalam kehidupan masyarakat adat Gurusina hingga kini masih hidup sejumlah upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai

meninggal, ditambah dengan upacara-upacara lain dalam siklus kehidupan. Selain itu, masyarakat masih menjalankan berbagai kearifan lokal yang tumbuh ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, Kampung Adat Gurusina juga menjadi salah satu kampung adat yang sering mendapat kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing. Kampung adat gurusina juga merupakan aset budaya yang harus dijaga oleh masyarakat kampung adat, dibantu dengan pemerintah dalam pemeliharaan aset budaya agar tidak punah atau hilang karena perkembangan zaman.

Peran pemerintah dan masyarakat untuk tetap melestarikan budaya dan kemajuan sektor kepariwisataan adalah suatu keharusan, karena adat istiadat dan budaya merupakan jati diri dari masyarakat sebagai penganut budaya tersebut yang memiliki nilai pariwisata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah tersebut. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah terkait pembangunan kampung adat Gurusina, apalagi pemerintah telah membantu masyarakat dalam pendanaan untuk membangun kembali rumah adat yang terbakar 2018 lalu. Hanya saja setelah pembangunan rumah adat pasca kebakaran 2018 lalu, pemerintah belum maksimal dalam pengembangan selanjutnya misalnya pemberdayaan masyarakat dan promosi tempat wisata. Dibutuhkan peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata budaya Kampung Adat Gurusina, sehingga dalam pengembangan wisata budaya tersebut menguntungkan bagi masyarakat Kampung Adat Gurusina dan daerah.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, ide utama dari pemberdayaan berkaitan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan ataukah minat mereka. Ilmu sosial tradisional

menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan (2007:86) mendefinisikan sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, karena dengan partisipasi masyarakat dapat memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat, serta membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri (Sulistiyani, 2004:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh individu atau masyarakat tersebut. Untuk mencapai kemandirian tersebut diperlukan proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.

2. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata

Keberhasilan pengembangan wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan destinasi wisata. Peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata disuatu daerah sangatlah penting, karena masyarakatlah yang menyediakan sebagian besar atraksi wisata sekaligus menentukan kualitas dari produk wisata tersebut. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu daerah

wisata akan mempengaruhi terhadap destinasi wisata tersebut. Masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata.

Terdapat empat tahap peran masyarakat menurut (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011). Masyarakat haruslah menjalankan peranannya melalui empat tahap agar tujuan dari sebuah program dapat terlaksana. Empat tahap tersebut, diantaranya:

- a) Peran dalam pengambilan keputusan. Peran ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b) Peran dalam pelaksanaan. Peran ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.
- c) Peran dalam pengambilan manfaat. Peran ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d) Peran dalam evaluasi, peran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam (Yoeti 1997:63). Spilane (1987) menyatakan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, baik dilakukan oleh perorangan maupun secara

berkelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka seperti berekreasi, mendapat pengalaman baru, mencari kebahagiaan dan bukan untuk berusaha atau mencari nafkah, serta tidak menetap.

UU Nomor 10 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU Kepariwisataan) Bab 1 Pasal 1 memberikan pengertian bahwa:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
- b) Wisatawan adalah orang yang melaksanakan wisata.
- c) Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d) Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

4. Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Pihak yang dimaksud menurut (Damanik & Weber, 2006) dalam keterlibatan sebagai pelaku pariwisata adalah sebagai berikut:

a) Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik social, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.

b) Industri Pariwisata atau Penyedia Jasa

Industri pariwisata atau penyedia jasa adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Disini industri pariwisata atau penyedia jasa digolongkan ke dalam dua jenis. Pertama yaitu pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi atau hiburan, dan lain-lain. Kedua yaitu pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.

c) Pendukung Wisata

Pendukung Wisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.

d) Pemerintah

Pemerintah adalah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab

dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

e) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim dikawasan wisata, mereka merupakan salah satu pemeran penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat local merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang di kunjungi sekaligus di konsumsi wisatawan, berupa air, tanah, hutan, dan lanskap merupakan sumber daya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada ditangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata dan juga hampir sepenuhnya milik mereka.

f) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pokdarwis adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

5. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut obyeknya, pariwisata dibagi ke dalam beberapa jenis pariwisata antara lain, yaitu:

- a) *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
- b) *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi

di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.

- c) *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
- d) *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
- e) *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
- f) *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya *study tour*, piknik, dan lain-lain.
- g) *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
- h) *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan, serta minum.

6. Pengembangan Pariwisata

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34), pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat

wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut.

Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut (Swarbrooke 1996;99) terdapat beberapa jenis pengembangan pariwisata, yaitu:

- a) Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
- b) Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
- c) Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pasar baru.
- d) Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

- e) Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

7. Kriteria Keberhasilan Pengembangan Pariwisata

Menurut Suwanto (1997:20), pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan:

a) Kelayakan Finansial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus diperkirakan dari awal.

b) Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi regional, seperti menciptakan lapangan pekerjaan atau berusaha, peningkatan pendapatan devisa dan lain-lain.

c) Kelayakan Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk membangun suatu objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik suatu objek wisata tersebut membahayakan keselamatan wisatawan atau tidak.

d) Kelayakan Lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan, alam dan manusia dengan tuhan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif termasuk sebuah pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekan subjektivitas juga arti pengalaman bagi individu. Menurut Moleong (2018:6), pendekatan secara kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (lisan) dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2019:18) etode deskriptif kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah (Moleong, 2014). Fokus penelitian ini, meliputi:

- a) Peran pemerintah daerah dalam pengembangan Kampung Adat Gurusina yang meliputi regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator.
- b) Peran masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Gurusina sebagai pemrakarsa, pelaksana, sebagai penyerta, sebagai peninjau, dan penerima manfaat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada serta Kampung Adat Gurusina, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui karakteristik dari Kampung Adat Gurusina.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina

Mengingat pariwisata sebagai aspek penting dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengelolaan dan pengembangannya sangat perlu. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Dalam mengembangkan atau menciptakan tempat wisata, pemerintah mempunyai peran penting karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan, dan mempromosikan tempat wisata tersebut.

Peran Dinas Priwisata Kabupaten Ngada adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat terkat penegelolaan pariwisata, serta melibatkan pihak lain dalam hal pembangunan dan pemberdayaan.

Menurut Arif (2012) peran pemerintah daerah ada empat, diantaranya:

a) Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah dijalankan yaitu dengan menetapkan kampung adat Gurusina sebagai desa wisata yang dinyatakan dalam Perda Ngada Nomor 2 Tahun 2017, RIPPARDA tahun 2007-2032 yang

memuat tentang daya tarik wisata alam, budaya, dan minat khusus. Sehingga kampung adat Gurusina masuk dalam wisata budaya.

b) Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada dapat dijelaskan peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah sudah melibatkan pihak lain dalam hal ini yayasan Indekon dan yayasan Ecoforest. Dengan adanya bantuan dari kedua yayasan tersebut memberikan manfaat terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina.

Bentuk keterlibatan yayasan Indekon terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina adalah pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan seperti manajemen pengelolaan desa wisata, pewarnaan alami untuk kain tenun, kerajinan tangan atau souvenir, dan pengelolaan homestay. Kemudian bentuk keterlibatan dari yayasan Ecoforest adalah membantu mengirimkan volunteer atau sukarelawan untuk melatih tata cara pengelolaan pariwisata mulai dari kebersihan kampung, membangun jaringan, serta pengelolaan homestay.

Selain kerja sama dengan Indekon dan Forest Tourism, ada bentuk kerlibatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan bantuan melalui pembangunan kembali pasca kebakaran yang menimpa 26 rumah adat tahun 2018 lalu. Dan dari Dinas Pariwisata sendiri terus melakukan penguatan kapasitas untuk masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.

Dalam hal ini, Pemerintah juga melibatkan instansi pemerintahan lainnya seperti Dinas PU Kabupaten Ngada terkait akses jalan menuju destinasi wisata kampung adat Gurusina yang sekarang bisa dibidang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait

pemeliharaan situs budaya dan dinas sosial terkait kesejahteraan masyarakat. Belajar dari pengalaman pemerintah telah membangun bak penampung air untuk keperluan dan atau menjaga-jaga apabila terjadi kebakaran kecil. Selain itu, pemerintah tentunya melibatkan PLN dan PDAM untuk memenuhi kebutuhan listrik dan air minum bagi masyarakat dan wisatawan.

c) Sebagai Fasilitator

Terkait peran pemerintah sebagai fasilitator, kampung adat Gurusina merupakan kampung adat sehingga pemerintah sangat hati-hati terkait pembangunan yang berbentuk fisik. Kampung Gurusina sudah ditetapkan sebagai destinasi dan sudah menjadi situs budaya, sehingga pasca kebakaran tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan untuk merehab kampung Gurusina. Ini adalah peran dari pemerintah untuk mendukung dan melestarikan kampung-kampung adat.

Sebagai fasilitator pemerintah membuat kesepakatan dengan masyarakat, intervensi yang mereka ambil adalah pendampingan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM. Jadi, setiap ada pelatihan yang dibuat oleh dinas pariwisata, masyarakat Gurusina akan diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, oleh BPO di Kabupaten Ngada terdapat dua desa wisata yaitu desa wisata Tololela dan Desa wisata Gurusina. Kedua desa tersebut masuk dalam jaringan pola perjalanan wisata, sehingga dua desa ini menjadi titik untuk kampung adat.

d) Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah dalam pengembangan produk pemerintah bekerja sama dengan BPO dan NJO, selain produk sebagai destinasi wisata ada produk turunan yang

dihasilkan, sehingga dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan mutu. Misalnya souvenir, setelah ada pendampingan dan pelatihan daya beli wisatawan meningkat.

Ditambahkan juga bahwa untuk promosi wisata kampung adat Gurusina sampai dengan saat ini belum maksimal karena keterbatasan SDM terkait bidang pemasaran. Keterbatasan ini ada di masyarakat sebagai pengelolanya karena dari pemerintah sudah melatih dalam pembuatan website. Kemudian pemerintah masukan ke dalam link dengan kementerian pariwisata, dan kementerian keminfo yang berhubungan dengan travel digital marketing. Jadi, pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kemasan promosi itu sudah sering pemerintah buat. Harapannya setiap ada *event* atau acara adat di kampung Gurusina harus sering diupload atau dipromosikan ke media sosial, sehingga dari dinas pariwisata sendiri dapat memperluas jaringan.

2. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina

Keberhasilan pengembangan wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan destinasi wisata. Peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata disuatu daerah sangatlah penting, karena masyarakatlah yang menyediakan sebagian besar atraksi wisata sekaligus menentukan kualitas dari produk wisata tersebut. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu daerah wisata akan mempengaruhi terhadap destinasi wisata tersebut. Masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan

kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata.

Bentuk peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata menurut (Dian Herdiana, 2019), yaitu:

a) Sebagai Pemrakarsa

Peran masyarakat sebagai pemrakarsa yaitu menginisiasi masyarakat untuk tetap menjaga keaslian dari adat-istiadat serta budaya kampung adat Gurusina adalah adanya kesadaran dari masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan keaslian dari budaya atau tradisi mereka. Menurut beliau soal pariwisata sebenarnya bonus, sehingga bagaimana mereka mengemas bonus tersebut. Mereka akan tetap menjaga keaslian dari adat-istiadat serta budaya karena kepatuhan mereka terhadap leluhur. Untuk itu, mereka akan tetap mewarisi budaya tersebut meskipun di zaman sekarang kehidupan seperti itu dianggap kolot tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

b) Sebagai Pelaksana

Peran sebagai pelaksana bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina, pemerintah hanya mengarahkan. Masyarakat Gurusina selaku pengelola selalu mengikuti arahan baik dari pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat lainnya terkait kepariwisataan.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan tetap menjaga ciri khas dari rumah adat saja masyarakat sudah turut berperan dalam usaha pengembangan destinasi wisata Gurusina. di kampung adat Gurusina sendiri ada lembaga pengelola pariwisata sehingga, semuanya diatur mulai dari kebersihan sampai dengan pembangunan.

c) Sebagai Penyerta

Peran masyarakat sebagai penyerta, bahwa bentuk partisipasi dari masyarakat adalah tersedianya petugas penjaga pintu masuk dengan tugas

utamanya adalah mencatat jumlah wisatawan dengan jumlah uang yang diterima dari setiap wisatawan. Dalam pengelolaannya belum menetapkan biaya karcis masuk, sampai dengan saat ini masih dengan sistem donasi atau pemberian secara sukarela dari wisatawan. Lebih lanjut beliau menyatakan di Kampung Gurusina tersedia layanan *homestay* dengan sistemnya bergilir.

d) Sebagai Peninjau

Peran masyarakat sebagai peninjau adalah masyarakat tetap meninjau langsung, masyarakat menilai apakah kebijakan mengenai pariwisata yang dibuat baik untuk kedepannya atau tidak. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sebagai peninjau adalah turut hadir dalam kegiatan penyuluhan mengenai desa wisata yang diadakan pemerintah maupun lembaga pengelola.

Dijelaskan bahwa masyarakat terlibat dalam pengawasan kebijakan atau program untuk pengembangan wisata Gurusina. Karena pola pembangunan pariwisata saat ini berbasis masyarakat, segala bentuk kebijakan harus menguntungkan atau berdampak baik bagi masyarakat. Pembangunan pelestarian situs budaya, pemerintah telah mengalokasikan untuk pembangunan kembali rumah adat yang terdampak musibah kebakaran yang lalu. Pembangunan tetap sesuai dengan bahan dan bentuk yang lama, kalau tidak dana tersebut harus dikembalikan.

Sebagai peninjau masyarakat telah berbuat sesuai dengan kapasitasnya. Masyarakat akan mengawasi setiap kebijakan yang ada. Sebagai salah satu contoh kebijakan menjadikan rumah-rumah adat sebagai penginapan atau *homestay*. Masyarakat tentunya setuju atas kebijakan ini karena menguntungkan bagi masyarakat dengan biaya Rp 175.000.00 permalam dengan rincian untuk pemilik rumah sebesar Rp

150.000.00 dan untuk lembaga pengelola sebesar Rp 25.000.00. Selanjutnya, untuk biaya masuk akan diusahakan oleh masyarakat untuk menggunakan karcis sehingga dapat ditetapkan biaya yang pasti untuk setiap wisatawan.

e) Sebagai Penerima Manfaat

Peran masyarakat sebagai penerima manfaat adalah dengan adanya pengembangan pariwisata ini turut memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat menerima manfaat dari penyewaan *homestay* dan pakaian adat, penjualan seperti tenunan, makanan dan minuman, sovenir atau kerajinan tangan lainnya.

Tidak hanya itu, semakin banyak destinasi wisata di kabupaten Ngada maka semakin banyak pula ketertarikan orang untuk datang berkunjung di kabupaten Ngada. Otomatis pertukaran uang akan semakin besar di wilayah kabupaten Ngada mulai dari perhotelan, restoran, objek wisata lain milik pemerintah dan lainnya sehingga pemerintah daerah bisa mengambil keuntungan disini yang bisa meningkatkan PAD. Karena untuk wisata Gurusina secara langsung pemerintah tidak punya jatah untuk menarik pajak atau retribusi karena itu milik masyarakat setempat sebagai pengelolanya.

3. Hambatan dan Dukungan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina

a) Faktor Penghambat

Faktor penghambat pengembangan destinasi wisata datang dari masyarakat sendiri. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga upaya yang muncul dari masyarakat sangat kecil dalam mengembangkan kampung Gurusina sebagai destinasi wisata yang unggul. Selain dari masyarakat biasa juga dari kelembagan atau pengelola yang belum kompak

dibandingkan dengan masyarakat desa wisata Tololela yang sudah lebih maju. Dalam hal ini, masyarakat masih lemah dalam pengelolaan mulai dari kesiapan dan kematangan dari pengurus atau pengelola sampai dengan tahapan promosi.

b) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengembangan destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina meliputi memiliki daya tarik dari kampung adat Gurusina itu sendiri seperti upacara rumah-rumah tradisonanya dan upacara-upacara adat. Selain itu, kampung adat Gurusina letaknya strategis berada di pinggir jalan trans selatan kabupaten Ngada, transportasi mudah bisa menggunakan kendaraan pribadi atau sewa baik kendaraan roda dua atau empat, sudah ada perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Otoritas Pariwisata yang telah menetapkan kampung adat Gurusina sebagai desa wisata. Kampung adat Gurusina juga ditetapkan masuk dalam RIPPARDA, telah mendapat kerja sama dengan yayasan Indecon, Forest Toursm dan, LSM dalam hal pemberdayaan, serta sudah memiliki jalur tracking yang menghubungkan beberapa wisata lain. Dari faktor pendukung yang adanya diharapkan turut meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung di kampung adat Gurusina.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada sudah cukup optimal. Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada sudah berperan sebagai regulator dimana telah membuat kebijakan mengenai kepariwisataan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Ngada No. 2 Tahun 2007. Selain itu Kampung Adat Gurusina juga masuk

kedalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah atau RIPPARDA. Selanjutnya peran Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada sebagai dinamisor yang meliputi kelembagaan dan melibatkan *stakeholder* guna mempercepat pengembangan Kampung Adat Gurusina yang lebih baik. Menjalankan perannya sebagai dinamisor pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada telah melibatkan Yayasan Indecon dan Forest Toursm, LSM, dan instansi pemerintahan lain seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PLN dan PDAM, juga masyarakat sebagai pengelolanya. Dengan peran serta Yayasan Indecon dan Forest Toursm, LSM, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Dinas PU, PLN, PDAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mereka menjalankan perannya sebagai fasilitator terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina.

Sebagai fasilitator mereka memfasilitasi mulai dari jalan, pusat informasi wisata, perpustakaan, pembangunan rumah-rumah adat pasca musibah kebakaran dan jalur tracking yang menghubungkan beberapa destinasi wisata, serta pemberdayaan dengan pelatihan untuk penguatan keterampilan dan SDM masyarakat. Hanya saja, terkait bangunan fisik pemerintah sangat hati-hati sehingga, sampai dengan saat ini toilet belum disediakan untuk wisatawan. Bagi wisatawan dapat menggunakan toilet yang sifatnya milik pribadi atau keluarga.

Selanjutnya terkait peran Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada sebagai katalisator terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina adalah dengan giat melakukan promosi wisata baik melalui media cetak maupun media online. Hal ini terbukti dengan akan dilakukannya festival wolobobo dengan memasukan Destinasi wisata Gurusina dalam festival tersebut. Dan oleh BPO telah menetapkan kampung adat Gurusina ini sebagai desa wisata, sehingga oleh BPO membantu

mengembangkan produk pariwisata kampung adat Gurusina. Namun, secara keseluruhan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata belum maksimal dalam hal promosi.

Sedangkan, berdasarkan analisis peran yang diberikan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina sebagai berikut peran masyarakat sebagai pemrakarsa adalah dengan mempertahankan keaslian adat istiadat yang sudah dijalankan oleh leluhur sejak dahulu kala. Masyarakat adat Gurusina dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun akan tetap mempertahankan adat-istiadat mereka, sehingga inilah yang menjadi modal atau daya tarik wisata dimana sekarang dunia sedang berlomba-lomba untuk kehidup dijaman modern tetapi masyarakat Gurusina tetap menjalankan kehidupannya dengan adat dan budaya tradisonal mereka.

Peran masyarakat sebagai pelaksana adalah terlibat langsung dalam menjadikan Kampung Adat Gurusina ini sebagai destinasi wisata, karena dari pemerintah hanya mengarahkan masyarakat tetap yang menjalankan. Hanya saja masyarakat ada yang kurang aktif terkait pengembangan destinasi kampung adat Gurusina, sehingga tugas pemerintah dan lembaga pengelola harus lebih giat mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan pariwisata yang ada. Peran masyarakat sebagai penyerta adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan Kampung Adat Gurusina seperti menjaga pintu masuk kampung, menyediakan karcis bagi pengunjung dengan sistem donasi, penyediaan *homestay*, pertunjukan atraksi wisata seperti tarian dan nyayian tradisonal, permainan alat musik tradisonal, pembuatan makanan khas, dan sebagainya.

Peran masyarakat sebagai peninjau adalah dengan ikut serta dalam peninjauan terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kampung adat Gurusina, apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan kampung adat Gurusina atau tidak. serta terlibat dalam kegiatan

penyuluhan terkait desa wisata yang diadakan pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan. Peran masyarakat dalam penerimaan manfaat adalah dengan adanya wisata ini, turut berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat Gurusina yang kebanyakannya adalah sebagai seorang petani saja tapi, dengan ditetapkannya Gurusina ini sabagai salah satu destinasi wisata budaya masyarakat dapat mengembangkan ekonominya dengan melakukan penyediaan jasa homestay, penyewaan pakaian adat, serta masyarakat lokal juga menjual souvenir khas seperti kerajinan tangan, tenunan kain adat dan yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahawa dengan adanya pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap peningkatan ekonomi.

Faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina. Adapun faktor penghambatnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat serta lembagaan pengelolaannya yang belum solid. Faktor pendukung dalam pengembangan destinasi Wisata Kampung Adat Gurusina meliputi memiliki daya tarik dari kampung adat Gurusina itu sendiri seperti upacara rumah-rumah tradisonalnya dan upacara-upacara adat. Selain itu, kampung adat Gurusina letaknya strategis berada di pinggr jalan trans selatan kabupaten Ngada, transportasi mudah yang mana dapat menggunakan kendaraan pribadi atau sewa baik kendaraan roda dua atau empat, sudah ada perhatian dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta Badan Otoritas Pariwisata yang telah menetapkan kampung adat Gurusian sebagai desa wisata, masuk dalam RIPPARDA, sudah bekerja sama dengan yayasan Indecon Forest Toursm dan LSM dalam hal pemberdayaan, serta sudah ada jalur tracking yang menghubungkan beberapa wisata lain.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan ialah :

a) Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih giat lagi memberikan pelatihan guna memperkuat SDM masyarakat. Karena masyarakat memiliki peran yang sangat vital bagi pengembangan destinasi wisata Kampung Adat Gurusina.

b) Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk tetap berperan aktif terhadap pengembangan destinasi wisata kampung adat Gurusina serta lebih meningkatkan kesadaran untuk sama-sama menjaga warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut. Hal tersebut juga akan berdampak bagi masyarakat sendiri karena jika pengunjung semakin banyak maka tingkat ekonomi masyarakat juga akan ikut berpengaruh

REFERENSI

- Andi, S. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Anonim. (2009). *Undang Undang Tentang Kepariwisataan, UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM
- Anonim. (2009). *Undang-Undang Tentang Kepariwisataan, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM
- Giantari, I. K., & Barreto, M. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(1), 44–67.
- Gunn, C. A. (1994). Issues in Tourism Curricula. *Journal of Travel Research*, 36(4), 74–87.
- Gustina, R. D., & Mussadun, M. (2018). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Pantai di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 144–154.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63–86.
- Khaja, K. A., Sequeira, R. P., Alkhaja, A. K., & Damanhuri, A. H. (2014). Drug Treatment of Hypertension in Pregnancy: A Critical Review of Adult Guideline Recommendations. *Journal of Hypertension*, 32(3), 454–463.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Priyanto, P. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), 244–262.
- Satumanatpan, S., Moore, P., Lentisco, A., & Kirkman, H. (2017). An Assessment of Governance of Marine and Coastal Resources on Koh Tao, Thailand. *Ocean & Coastal Management*, 14(8), 143–157.
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 79–96.
- Soekanto, S. (1987). *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawaliipress.
- Spillane J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utama, I. G. B. R., & Bagus, I. G. (2017). *Tourism Marketing*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Yoeti, O. (1997). *Perencanaan dan Perkembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradyanta Paramita.